

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakrta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Carl S. Werren, dkk, (2014). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Multivariate Dengan Program IMB SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Perdana Persada.
- Laboratoriun Statistika (2019). *Modul Panduan Statistika Terapan*. Penulis Laboratoriun Statistika Ikopin.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti, dan Hidayat, Syarifudin. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Andiani, Novira Juwita. dkk. (2017). "Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK-BMN Terhadap Kualitas Lapporan Keuangan". e-Proceeding of Management Vol.4 Desember. e-Journal On-Line melalui: libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id. Diakses pada: 8 Maret 2020.

- Anggraeni, Ayang Putri Septiayu. (2015). *“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”*. Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Maulana Malik Ibrahim Malang: Diterbitkan.
- Amaliah, Tri Handayani. dkk. (2019). *“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan SIMAK-BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi Vol.6 No.2 Maret. e-Journal On-Line melalui: jurnal.unigal.ac.id. Diakses pada: 20 Maret 2020.
- Kosadi, Ferry. Endang Supriatna. Tanpa Tahun. *“Pengaruh Implementasi SIMAK-BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Barang Milik Negara”*. e-Journal On-Line melalui: jurnal.inaba.ac.id. Diakses Pada: 26 Maret 2020.
- Kurnianto, Okta Dwi. (2017). *“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HasanudinMakasar: Diterbitkan.
- Kiranayanti dan Erawati. (2016). *“Pengaruh kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL TERhadap Lualitas Laporan Keuangan Daerah”*. E-journal Akuntansi Universitras Udayana. Vol. 16.2. Agustus (2016): 1290-1318 ISSN: 2302-8556. Diakses pada: 1 Juli 2020.
- Nasrudin, Edi. (2015). *“Efektivitas SIMAK-BMN Terhadap Pengelolaan Aset Negara”*. Jurnal Akuntansi Vol.13 No.2 Desember. e-Journal On-Line melalui: jurnal.unej.ac.id. Diakses Pada 8 Maret 2020.
- Rami, Muhammad Ridha. dkk. (2014). *“Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh”*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol.4 No.2 Desember. e-Journal On-Line melalui: sties-aceh.ac.id. Diakses pada: 8 Maret 2020.
- Ranny Hanafi. (2017). *“Faltor-Faktor yangmempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. E-journal On-Line melalui: Surakarta.ac.id. Diakses pada:1 Juli 2020.
- Zuliatrri. (2012). *“Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern AKuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”*. Sarjana Akuntansi pada fakultas Ekonomi Universitas Muriakudus Tahun 2012. On-Line: Diakses pada 2 Juli 2020.

Peraturan Pemerintah

Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor.71. Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

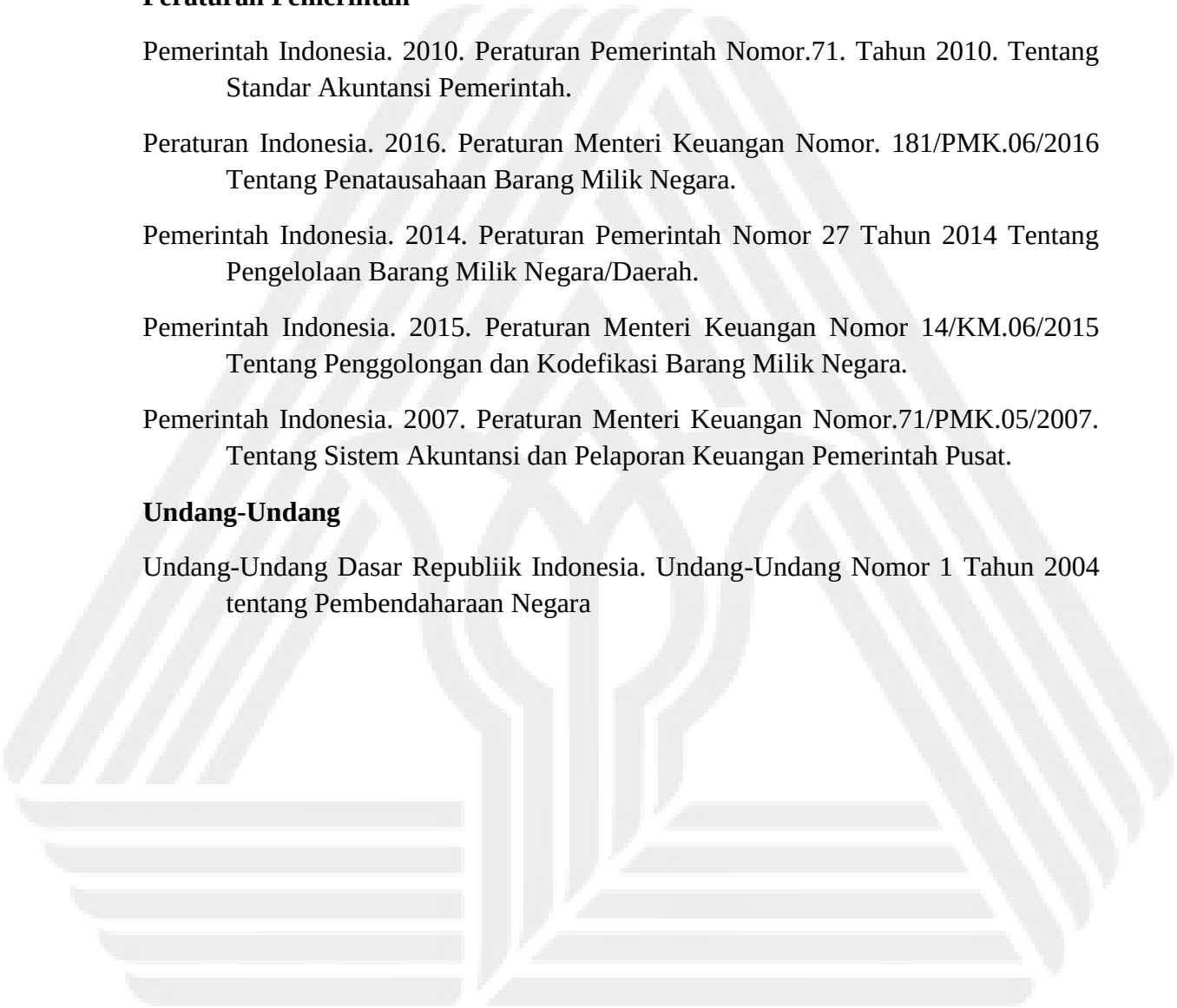
Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.06/2015 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Pemerintah Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.71/PMK.05/2007. Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara



IKOPIN